

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 terkait Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada dokumen perencanaan jembatan di Sumatera Barat dengan metode Triangulasi Data yang mencakup Dokumen review, wawancara, dan kuesioner untuk memastikan sejauh mana elemen keselamatan konstruksi telah diterapkan dalam dokumen perencanaan:

5.1.1 Mengukur tingkat pemahaman Safety in Design (SID) terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Berikut adalah kesimpulan dari hasil pengukuran tingkat pemahaman Konsultan Perencanaan terhadap penerapan RK-SMK:

1. Berdasarkan Hasil Dokumen Review pada Jembatan Prestressed dan Jembatan Komposit dalam penerapan RK-SMKK memiliki hasil persentase sebesar 62% dan 60% sehingga dapat kategorikan pada tingkat penerapan Baik.
2. Hasil Wawancara kepada Konsultan Perencanaan bahwa tingkat pemahaman Safety in Design (SID) serta penerapan RK-SMKK masih memiliki persentase sebesar 39,22% dapat di kategorikan tingkat penerapan kurang baik.
3. Hasil Kuesioner kepada Konsultan Perencanaan bahwa tingkat pemahaman terkait Pentingnya Teknologi Building Information Modeling (BIM) masih dalam kategori kurang baik, karena menghasilkan persentase sebesar 50,50% berdasarkan pemahaman antara Konsultan dan Kontraktor.

Berdasarkan hasil validasi data terhadap Penerapan RK-SMKK dengan Konsep Safety in Design (SID) bahwa Tingkat pemahaman konsultan perencana dalam penerapan masih kurang baik.

5.1.2 Analisis hambatan dan tantangan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Konstruksi Jembatan.

Berdasarkan hasil Dokumen review, wawancara dan kuesioner, Peneliti menemukan beberapa temuan yang berupa hambatan dan tantangan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek konstruksi jembatan yaitu:

1. Penyusunan tabel IBPRP (identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko dan peluang)

Penyusunan tabel IBPRP harus secara mendalam berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS) untuk mencegah atau mengurangi risiko kecelakaan konstruksi. Namun, implementasi yang kurang sistematis masih menjadi kendala di lapangan.

2. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan yang efektif, kurangnya alokasi dana untuk pelatihan tenaga ahli keselamatan serta penyusunan dokumen keselamatan yang rinci berdampak pada kualitas perencanaan dan implementasi keselamatan di proyek.

3. Kurangnya pemahaman dan penerapan Teknologi BIM

Teknologi Building information Modeling berperan penting dalam mengintegrasikan aspek keselamatan sejak tahap desain. Namun, penerapannya di kalangan konsultan perencana masih terbatas akibat kurangnya pelatihan teknis, pemahaman, serta keterbatasan fasilitas teknologi pendukung.

Dari tantangan yang dihadapi oleh sebagian Konsultan Perencanaan yang menjadi salah satu faktor penghambat penerapan RK-SMKK dalam Dokumen Perencanaan di Indonesia.